

# **PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN**

**Selvi dan A.Dahri Adi Patra LS, S.E., M.M**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo

E-Mail : [Vhyselvhy29@gmail.com](mailto:Vhyselvhy29@gmail.com) dan [dahri8595@gmail.com](mailto:dahri8595@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*The purpose of this study is to evaluate the effect of implementing government accounting standards on the accountability of financial statements. This research was conducted at regional financial management agency offices Luwu Regency. This research uses a descriptive quantitative approach. The data used are primary data. Respondents in this study were all employees at the regional financial management agency office of Luwu Regency who were directly involved in regional financial management, namely the Head of the regional financial management agency, the Secretariat, the Budget and Treasury Division, the Regional Assets Division and the Accounting Division. The sampling method used in this study was purposive sampling method with 69 respondents. The data collection method is a survey using a questionnaire distributed to respondents. Data measurement scale with Likert scale. Analysis of the influence of variables using simple linear regression analysis method. The results of this study indicate the effect of implementing government accounting standards has a significant and positive effect on financial management accountability.*

**Keywords : Government Accounting Standards and financial management accountability.**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penerapan pernyataan Standar Akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala Badan Pengelolaan keuangan Daerah, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan , Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan 69 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.**

## PENDAHULUAN

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilakukan otonomi daerah dan Desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukheni, 2010)

Standar akuntansi pemerintah di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. penerapan SAP sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. penerapan SAP dalam laporan keuangan juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas (Zeyn, 2011) Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik

dan yang berkaitan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu nampaknya belum sepenuhnya diterapkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih sering ditemukan penyimpangan dan penyalagunaan uang publik. Hal ini ditandai dengan adanya perolehan opini TMP (*disclaimer*) pada tahun 2012 dan memperoleh opini WDP pada tahun 2013 dan 2014. Adanya kenaikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari WDP menjadi WTP selama dua tahun terakhir menandakan adanya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai SAP yang berlaku umum. Meskipun perolehan opini atas LKPD adalah WTP, bukan berarti pemerintah tersebut telah benar-benar menjadi pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP terkadang masih di temukan tindak pidana korupsi atau penggelapan uang yang mengakibatkan pemerintah harus mengalami kerugian, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu di temukan pada saat pemerintah daerah memperoleh opini WTP yakni tahun 2016 yang menyebabkan pemerintah mengalami kerugian Rp.8 milyar ([http : //infokorupsi.com](http://infokorupsi.com) diakses pada 24 Desember 2017).

Standar akuntansi pemerintah di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. penerapan SAP sangat

penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. penerapan SAP dalam laporan keuangan juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas (Zeyn, 2011) Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Adapun beberapa penelitain yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Ichal dkk 2014), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, Dan Zeyn (2011) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntabilitas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Nugraeni dan Budiantara (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Izza Maulida Santoso dkk (2017), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun beberapa penelitain yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Ichal dkk 2014), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, Dan Zeyn (2011) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntabilitas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Nugraeni dan Budiantara (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Izza Maulida Santoso dkk (2017), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah**

Menurut Indra Bastian (2010:138), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu

peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah standar akuntansi pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemen maupun dipemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2007:123)

Standar akuntansi pemerintah digunakan sebaigian pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Nurlan Darise, 2008:39)

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan

pemeriksa keuangan (BKP) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: opini Wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (WT), dan pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberika opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti laporan keuangan yang di laporkan pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dilakukan laporan keuangan sudah disajikan dan di ungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja (Penny Kusumastuti, 2014:2).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik; untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan

keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Elvra zeyn,2011)

Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai evaluasi tahun berikutnya (Abdul Halim,2014).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian yang digunakan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian yang ada.

### Populasi dan sampel

#### Populasi

Populasi di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 215). Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah kepala BPKAD, Sekretaris, Bidang Akuntansi. Pengelolaan Keuangan daerah, bidang aset, dan seluruh pegawai/staf Di Kantor Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD), Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono,2013:215) sampel dalam penelitian ini adalah seluruh staf/pegawai di kantor BPKD Kabupaten Luwu sebanyak 69 pegawai. Pengambilan sampel di lakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Kriteria Penelitian Sampel

No	Kriteria
1.	Responden dalam penelitian ini adalah staf/pegawai sub bagian keuangan/akuntansi serta pegawai/staf pemegang kas pada satuan kerja.

2.	Responden dalam penelitian ini adalah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun.
----	---

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data primer yang di peroleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang disebarakan secara langsung kepada para responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu. Secara teknis, untuk selanjutnya

**Tabel 4.1** : Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	75	100%
2.	Kuesioner Kembali	69	92%
3.	Kuesioner yang tidak direspon	6	8%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	69	92%
n sampel yang kembali = 69			
Responden rate = $\frac{69}{75} \times 100\%$			
= 91,977%			

### Uji Normalitas

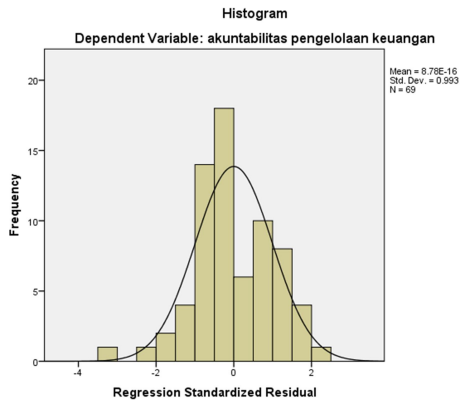
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang di analisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual

daftar pertanyaan terkait objek yang akan diteliti, kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

penelitian di distribusikan kepada setiap responden surat permohonan izin untuk melakukan penelitian di kantor BPKD Kabupaten Luwu, di ajukan selama ±2 bulan dan pengambilan kuesioner dilakukan.

Adapun data penulisa perolehan mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

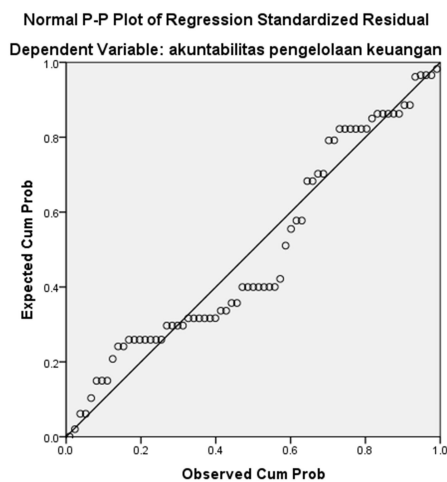
tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.



**Gambar 4.2** Grafik Histogram Uji Normalitas

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun kekiri dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual

yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:



Sumber: data primer,2020

**Gambar 4.3** Grafik Plot Uji Normalitas

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apa bila residual berasal dari distribusi yang normal maka nilai sebaran sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa

sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

### Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah

**Tabel 4.5** Uji *multikolonieritas*

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SAP	1.000	1.000

Sumber: data primer yang diolah 2020  
Berdasarkan hasil uji *multikolinieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah  $>0,100$  besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah variabel standar akuntansi pemerintah 1000. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antara variabel independen maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus  $>0,100$ .

Selain itu nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 1,000 untuk standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus  $<10.000$ . sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala

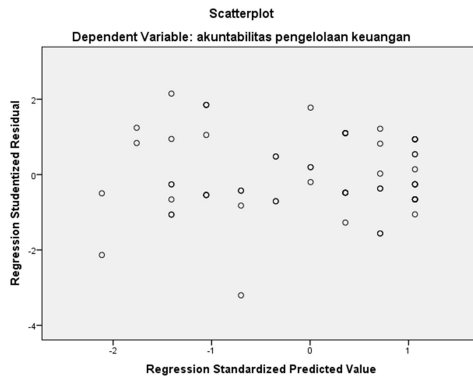
model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

*multikolonieritas* antara variabel independen dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:





Sumber: data primer yang diolah 2020

**Gambar 4.4** Uji *Heteroskedastisitas*

Gambar di atas menunjukkan gambar yang diperoleh dari uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan variabel independen

adalah penerapan standar akuntansi pemerintah.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel standar akunkuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor BPKD Kabupaten Luwu. Hasil dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6** Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	12.633	3.504
	SAP (X)	.715	.109

Dari tabel hasil analisis regresi linear sederhana diatas, diperoleh koefisien variabel bebas X (Standar Akuntansi Pemerintah) sebesar 0,715 oleh karena

itu persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 12,633 + 0,715 x + e$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  
 x : Standar Akuntansi Pemerintahan  
 e : Error

persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 12,633 artinya apa bila variabel bebas
- b. Bernilai nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten luwu tetap sebesar 12,633
- c. Nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,715 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)

adalah positif atau searah, artinya jika ditingkatkan variabel standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,715

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari  $r_{table}$  pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut:

**Tabel 4.7** Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Kerangan
Standar Akuntansi Pemerintah	X.1	0,826	0,2335	Valid
	X.2	0,575	0,2335	Valid
	X.3	0,822	0,2335	Valid
	X.4	0,549	0,2335	Valid
	X.5	0,672	0,2335	Valid
	X.6	0,826	0,2335	Valid
	X.7	0,579	0,2335	Valid
Akuntabilitas Laporan Keuangan	Y.1	0,772	0,2335	Valid
	Y.2	0,668	0,2335	Valid
	Y.3	0,813	0,2335	Valid
	Y.4	0,671	0,2335	Valid
	Y.5	0,772	0,2335	Valid
	Y.6	0,704	0,2335	Valid

	Y.7	0,829	0,2335	Valid
	Y.8	0,426	0,2335	Valid

Sumber: data diolah di SPSS 23, 2020  
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat di ketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *corrected item-correlation* > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

#### Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* > 0,60.

**Tabel 4.8** Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas
Standar Akuntansi Pemerintah (X)	0.773	0,60

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disampaikan bahwa seluruh variabel di gunakan pada penelitian ini telah reliable karena secara keseluruhan keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak untuk digunakan menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

#### Hasil Pengujian Hipotesis

**Tabel 4.9** koefisien determinasi adjusted R<sup>2</sup>

Model	Adjusted R Square
1	.381

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adjusted R<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang di berikan oleh variabel independen yang terdiri dari standar akuntansi pemerintah terhadap variabel dependen akuntntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 62%

#### Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisiensi determinan dilakukan untuk untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut:

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta membandingkan nilai signifikan dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah

5% (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40)

**Tabel 4.10** Hasil Uji Parsial (Uji t)

model	t	Sig
(Constant)	3.605	.001
SAP	6.549	.000

Berdasarkan data dari tabel 4.10 di atas maka hasil pengujian variabel bebas dijabarkan sebagian berikut:

Standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (6,549

$< 1.66724$ ) atau  $sig > \alpha$  (0,000 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Izza Maulida Santoso dkk (2017), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Budiantara (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah hasil pembahasan pemahaman (X) Standar Akuntansi Pemerintah, (Y) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Kabupaten Luwu. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  $t_{hitung} 6,549 > t_{tabel} 1.66724$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dimana hubungan antara

yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan antara individu maupun kelompok sebagai sebuah pertanggung jawaban tiap-tiap tindakan dan kepuasannya agar dapat di setujui maupun ditolak atau di berikan hukuman bilamana dikemudian adanya penyalagunaan kewenangan tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Selama periode pengamatan ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi bahwa uji-uji ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang menyimpang dari uji asumsi klasik, sehingga data yang diperoleh memenuhi persyaratan menggunakan model persamaan regresi linear sederhana.

Peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel independen standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 23,0 Dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan hasil. Berdasarkan hasil pengujian  $H_1$  menunjukkan bahwa pada kantor BPKD Kabupaten Luwu standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif atau  $H_1$  dapat diterima.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dimana masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain :

1. Kurangnya pembahsan dan silap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner

yang diberikan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei, wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.

2. Peneliti menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen untuk mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Saran

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian antara lain:

1. Peneliti di sarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan diperlukan sampel yang lebih banyak
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidaknya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat dilakukan dengan cara pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.

Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat di tentukan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang di peroleh nantinya tidak bias dan sesuai tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan 15. 2014. Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bastian, Indra, SE. Akt., M,B.A, Ph.D, (2005), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.
- Bastian, indra. 2016. Akuntabilitas sector publik: suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Budiantara M, dan Nugraeni. (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol 12 (1).
- Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group (diakses pada 03-05-2019)
- Chan, James L., dan Qi Zhang. 2012. *Government Accounting Standards and Policies. Handbook on public financial management.*(diakses pada 23-04-2019)
- Dr.Siregar, Baldric MBA., CMA., CA., Ak.april (2017), Akuntansi Sektor Publik.(diakses pada 14-05-2019)
- Elsevier Ltd, d kk(2019) Masalah akuntabilitas: Respons internal tekanan eksternal dalam organisasi yang terpapar membahas implikasi temuan kami untuk teori dan praktik. (diakses pada 14-05-2019)
- Elvira, zeyn. 2011. Pengaruh penerapan goog governance dan standar akuntansi pemerintah tentang akuntabilitas keuangan dan komutmen organisasi.
- Firdaus nova roslina,weli sujono. 2017. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (DPPK) pemerintah kabupateb bandung.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS.* Universitas Semarang. Semarang.
- Ghozali.2016 akuntansi pemerintah pusat dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Jakarta salemba empat.
- Hyndman, Noel., dan Ciaran Connolly. 2011. *Accrual Accounting in the Public Sector: a Road not Always Taken. Management Accounting Research 22* (2011)jurnal volume 13, hal 36–45.
- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Inra kurnia. 2013. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Sumatra barat.
- Kuntadi, Chris. 2008. Salah Kelola Aset, LKPD Disclaimer. Majalah IAI. No. 13: 14-15.
- Lestari, Prettya. dan Arief Surya Irawan. 2014. Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu). Jurnal Volume 10, November 2014.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Monteiro, Bento Rodrigo Pereira., dan Ricardo Corrêa Gomes. 2013. International Experiences with Accrual Budgeting in the Public Sector. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, v. 24, n. 62, p. 103-112
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. akuntansi sector publik. Yogyakarta: Arismunandar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maulana robi. 2014. Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan good governance terhadap akuntabilitas keuangan pada dinas pemuda dan olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten majalengka.
- Mulyani, Pujianik. dan Rindah F. Suryawati. 2011. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) dalam

- Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 7, No.2, September 2011, 102-116.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty. Myers, Margaret. 2000. *Qualitative Research and The Generalizability*.
- Nugraheni, Purwaniati., dan Imam Subaweh. 2008. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1 Vol.13, April 2008, Hal.48-58.
- Nugroho 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Priyono Dwi. 2014. *Pengelolaang Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Question: Standing Firm with Proteus. The Qualitative Report. (Vol. 4), Num. 3/4.*
- Sugiyono. 2010. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2013: 215. *Populasi sebagai wilayah generilisasi*. Sugiyono. 2013. *metode penelitian bisnis*. Bandung.
- Sukhemi. 2010. *Permasalahan akuntabilitas public*.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Tanjung. 2012. *Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat*



- keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun pilitik.
- Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya.Visimedia Pustaka
- Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang). Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE. BPKP. 2016. Laporan Hasil Pengawasan BPKP Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. 2010. Akuntansi Aset. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Zeyn E (2011) Pengaruh *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan.Vol.1 No. (1).Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.